



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS PUTR
KABUPATEN
MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Kami juga akan terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 28 Februari 2024

Kepala Dinas PUTR

Kabupaten Majalengka

Dr. H. AGUS TAMIM., ST., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661109 199701 1 001

Diketahui Oleh :	
Sekretaris	<i>be</i>
Kabid Bina Marga	<i>nf</i>
Kabid Sumber Daya Air	<i>nf</i>
Kabid Tata Bangunan	<i>bm</i>
Kabid Tata Ruang	<i>f</i>
Kabid Bina Konstruksi	<i>nf</i>





KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



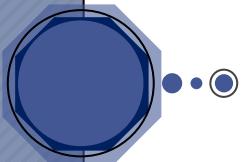
BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas PUTR Kabupaten Majalengka

a. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan;
- 3) pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan;
- 4) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
- 2) pelaksanaan urusan Peralatan dan Perbengkelan;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
- 4) pengawasan urusan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
- 5) pelaporan urusan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan Laboratorium dan Pengujian Bahan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- 2) Pelaksanaan urusan Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- 4) pengawasan urusan kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- 5) pelaporan urusan kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan kebinamargaan, bangunan dan tata ruang di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
- 2) pelaksanaan urusan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Tata Ruang;
- 4) pengawasan urusan kegiatan UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
- 5) pelaporan urusan kegiatan UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

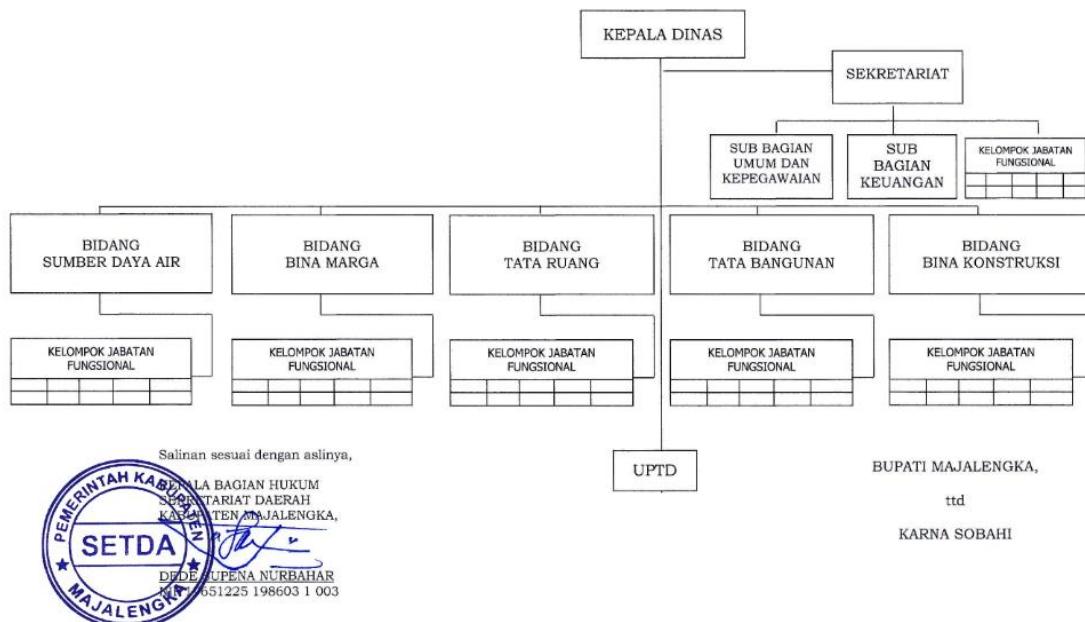
tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional urusan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan urusan Sumber Daya Air;
- 2) Pelaksanaan urusan Sumber Daya Air;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas urusan Sumber Daya Air;
- 4) Pengawasan urusan Sumber Daya Air;
- 5) Pelaporan urusan Sumber Daya Air; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 213 orang dengan rincian sebagai berikut:

INFOGRAFIK ASN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Laki-laki

183 Orang



Perempuan

30 Orang



Eselon



II B	1
III A	1
III B	5
IV A	20
IV B	18



Golongan

Jenis Jabatan

STRUKTURAL

PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2018 - 2023, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa
Minimnya fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di desa merupakan salah satu faktor penyebab desa sulit berkembang. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang kelancaran aktivitas ekonomi Masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
- Masih adanya kondisi jalan kabupaten yang rusak berat
Banyak faktor yang menyebabkan jalan kabupaten menjadi rusak berat, diantaranya adalah faktor alam seperti bencana dan cuaca ekstreme, kemudian tonase kendaraan yang melintas melebihi batas sehingga tidak sesuai dengan desain konstruksi jalan yang dibangun, dan masih banyak lagi penyebab masih adanya jalan kabupaten yang rusak berat.
- Adanya perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten;
Adanya perubahan status jalan desa menjadi jalan kabupaten merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, mengingat dengan semakin bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten maka akan berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan dimasa yang akan datang.
- Belum adanya Perda RDTR
Dalam rang mendukung pelaksanaan pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Majalengka yang efektif dan akuntabel, maka perlu adanya Perda RDTR yang dapat menjadi salah satu acuan pelaksanaan tata ruang.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

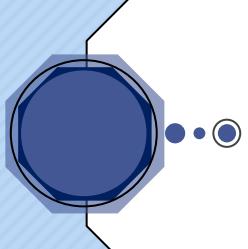
Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta SK Tim Penyusunan LKIP.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2018-2023:

Tujuan dan Sasaran Dinas PUTR Sebelum Perubahan

Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial,budaya dan akses antar wilayah	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap Jumlah bangunan gedung dan sarana publik lainnya yang ditangani Jumlah dokumen kebijakan tata ruang yang disusun dan sesuai dengan pemanfaatan ruang Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi

Tujuan dan Sasaran Dinas PUTR Setelah Perubahan

Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial,budaya dan akses antar wilayah	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan
2	Mewujudkan gedung dan lingkungannya yang representatif	Meningkatnya gedung dan lingkungannya yang laik fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF
3	Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Tertatanya ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang
4	Meningkatkan Kualitas Sarana/Prasarana Irigasi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Debit air termanfaatkan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	85,29%
2	Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	50 Gedung
3	Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	92%
4	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	45294 Ltr/Detik

PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	85,29%
2	Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	50 Gedung
3	Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	92%
4	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	45294 Ltr/Detik

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.097.341.442	10,64%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	49.236.879.110	20,08%
Program Penataan Bangunan Gedung	601.162.500	0,25%
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.366.593.500	0,56%
Program Penyelenggaraan Jalan	166.920.261.170	68,07%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	492.077.100	0,20%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	520.000.000	0,21%
JUMLAH TOTAL	245.234.314.822	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

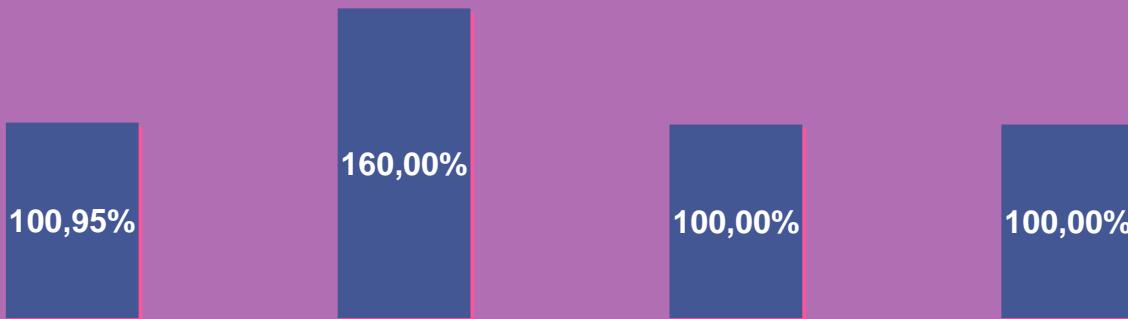
Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 115,24% dan seluruh indikator dapat mencapaian kinerja 100% atau lebih. Adapun Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

CAPAIAN IKU



Tingkat kemantapan jalan

Jumlah gedung yang memiliki SLF

Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang

Debit air termanfaatkan

BAB III

AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 5 (lima) Sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 115,24%. Sebanyak 4 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, 1 indikator tidak dapat dihitung, dan tidak ada Indikator yang tidak mencapai 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	85,29%	86,10%	100,95%
2	Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	50 Gedung	80 Gedung	160%
3	Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	92%	92%	100%
4	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	45294 Ltr/Detik	45294 Ltr/Detik	100%
RATA – RATA CAPAIAN					115,24%

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA



TINGKAT KEMANTAPAN JALAN



FAKTOR

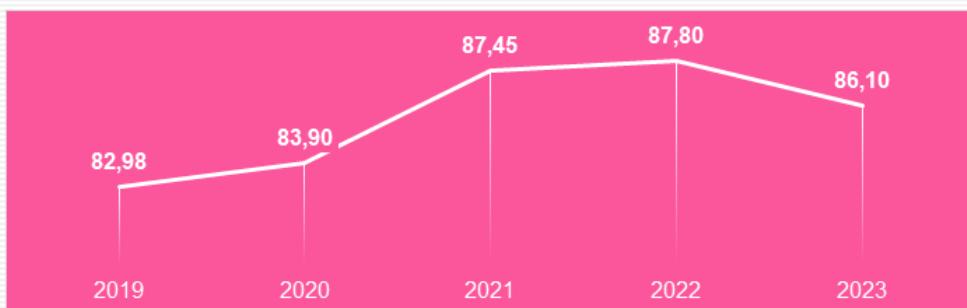
- Penanganan infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas yang merupakan salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka

PROGRAM

- Program Penyelenggaraan Jalan

EFISIENSI

- Efisiensi atas capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan pada program Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2023 adalah sebesar **0,44%**



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	85,29%	86,10%	100,95%

Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil melampaui target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100,95% dengan predikat capaian kinerja “MELEBIHI TARGET” yaitu dari target 85,29% berhasil direalisasikan hingga mencapai 86,10%. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini diantaranya adalah pada tahun 2023 program dan kegiatan penanganan infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas yang merupakan salah satu program dengan alokasi anggaran cukup besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tentunya akan berdampak pada peningkatan kondisi jalan di wilayah Kabupaten Majalengka.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	100,94%	103,47%	-2,53%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan sebesar -2,53% dari tahun sebelumnya yakni dari 103,47% di tahun 2022 menurun menjadi 100,94% di tahun 2023;

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat kemantapan jalan	86,10%	85,29%	100,95%

Jika dibandingkan dengan target Renstra, realisasi tingkat kemantapan jalan pada tahun 2023 sudah terealisasi hingga mencapai 86,10%, maka pada capaian renstra dari target ini sudah mencapai 100,95% dari target akhir Renstra sebesar 85,29%;

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	85,29%	n/a	Tidak dapat dibandingkan

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Indikator Kinerja Sasaran yang ke-1 yaitu **“Tingkat Kemantapan Jalan”**, Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil melampaui target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100,95% dengan predikat capaian kinerja “MELEBIHI TARGET” yaitu dari target 85,29% berhasil direalisasikan hingga mencapai 86,10%. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini diantaranya adalah pada tahun 2023 program dan kegiatan penanganan infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas yang merupakan salah satu program dengan alokasi anggaran cukup besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tentunya akan berdampak pada peningkatan kondisi jalan di wilayah Kabupaten Majalengka.



6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja tingkat kemantapan jalan dicapai melalui intervensi program yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Kepala Bidang Bina Marga	166.920.261.170

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

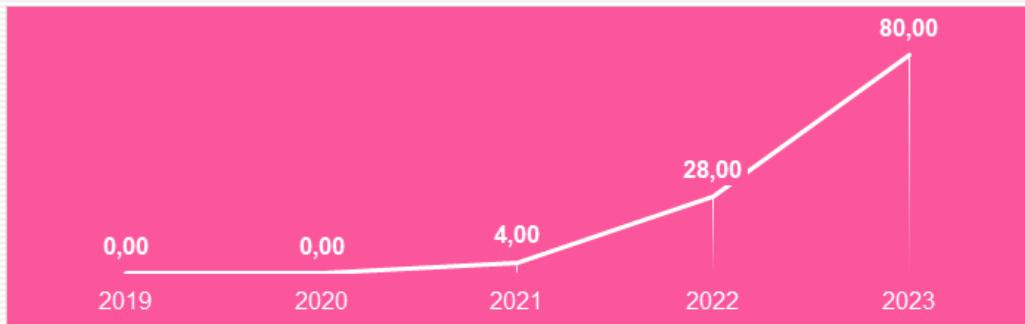
Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator **tingkat kemantapan jalan** pada sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan yaitu 0,44% atau sebesar Rp732.907.966 dari pagu anggaran Rp166.920.261.170 dengan realisasi Rp166.187.353.204



JUMLAH GEDUNG YANG MEMILIKI SLF



- FAKTOR**
- Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini diantaranya adalah ada dan digunakannya SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) yang oleh Dinas PUTR
- PROGRAM**
- Program Penataan Bangunan Gedung
- EFISIENSI**
- Efisiensi atas capaian indikator jumlah gedung yang memiliki SLF pada Program Penataan Bangunan Gedung tahun 2023 adalah sebesar **2,89%**



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	50 Gedung	80 Gedung	160%

Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil melampaui target dengan nilai capaian kinerja mencapai 160% dengan predikat capaian kinerja “MELEBIHI TARGET” yaitu dari target 50 gedung berSLF berhasil direalisasikan hingga 80 Gedung. Sama halnya dengan infrastruktur jalan, faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini diantaranya adalah Adanya SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) yang digunakan oleh Dinas PUTR;



2022/12/15 18:07

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	160%	140%	20%

Kemudian capaian kinerja indikator jumlah gedung yang memiliki SLF, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui mengalami peningkatan sebesar 20%, yakni di tahun 2022 tercapai 140%, kemudian meningkat ditahun 2023 menjadi 160%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya gedung dan lingkungannya yang laik fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	80 Unit	44 Unit	181,82%

Jika dibandingkan dengan target Renstra, realisasi Jumlah gedung yang memiliki SLF pada tahun 2023 sudah terealisasi hingga mencapai 80 Unit, maka capaian renstra dari target ini sudah mencapai 181,82% dari target renstra sebanyak 44 Unit;

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata / standar Provinsi / Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	50 Gedung	n/a	Tidak dapat dibandingkan

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya



Indikator Kinerja Sasaran yang ke-2 yaitu **“Jumlah gedung yang memiliki SLF”**. Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil melampaui target dengan nilai capaian kinerja mencapai 160% dengan predikat capaian kinerja “MELEBIHI TARGET” yaitu dari target 50 gedung bersLF berhasil direalisasikan hingga 80 Gedung. Sama halnya dengan infrastruktur jalan, faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini diantaranya adalah Adanya SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) yang digunakan oleh Dinas PUTR.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja Jumlah gedung yang memiliki SLF dicapai melalui intervensi program yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Kepala Bidang Tata Bangunan	601.162.500

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator **Jumlah gedung yang memiliki SLF** pada sasaran Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi yaitu 2,89% atau sebesar Rp17.355.380 dari pagu anggaran Rp601.162.500 dengan realisasi Rp583.807.120



PERSENTASE LAHAN YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN RUANG



FAKTOR

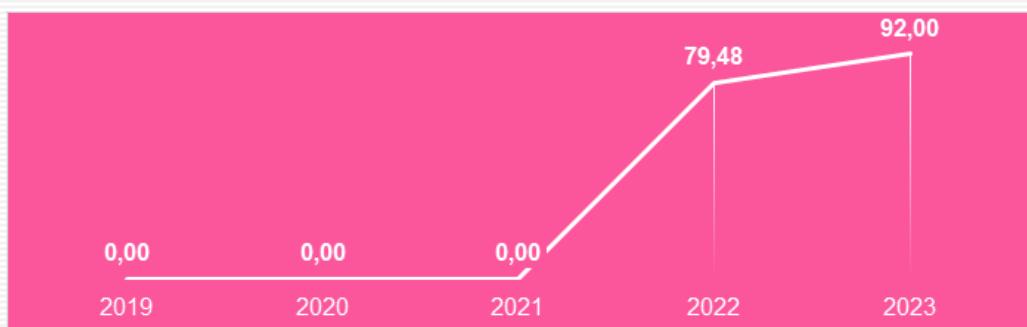
- Data eksisting yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan

PROGRAM

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

EFISIENSI

- Efisiensi atas capaian indikator persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2023 adalah sebesar **17,05%**



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	92%	92%	100%

Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil direalisasi sesuai target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat capaian kinerja “MENCAPAI TARGET” yaitu dari target 92% dan berhasil direalisasikan hingga 92%.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	100	87,34	+12,66

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang mengalami peningkatan sebesar 12,66% dimana pada tahun 2022 tercapai 87,34%, meningkat di tahun 2023 menjadi 100% sesuai target;

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Tertatanya ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	92%	92%	100,00%

Jika dibandingkan dengan target Renstra, Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang pada tahun 2023 sudah terealisasi hingga mencapai 92%, maka capaian renstra untuk target ini sudah mencapai 100% terealisasi dari target akhir renstra;

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	92%	n/a	Tidak dapat dibandingkan

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya



Indikator Kinerja Sasaran yang ke-3 yaitu **“Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang”** Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil direalisasi sesuai target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat capaian kinerja “MENCAPI TARGET” yaitu dari target 92% dan berhasil direalisasikan hingga 92%.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang dicapai melalui intervensi program yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kepala Bidang Tata Ruang	520.000.000

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator **Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang** pada sasaran Tertatanya Ruang yaitu 17,05% atau sebesar Rp88.648.500 dari pagu anggaran Rp520.000.000 dengan realisasi Rp431.351.500



DEBIT AIR TERMANFAATKAN

CAPAIAN 100%

TARGET

45294
Ltr/Detik

REALISASI

45294
Ltr/Detik

Realisasi 2022
57182 Ltr/Detik
Capaian 2022
110,45%

-11888

-10,40%

1

Target Renstra
45294 Ltr/Detik

Capaian terhadap
Renstra
100%

2

Perbandingan dengan Rata-Rata
Provinsi/ Nasional
tidak bisa dibandingkan

3

IKU : DEBIT AIR
TERMANFAATKAN

FAKTOR

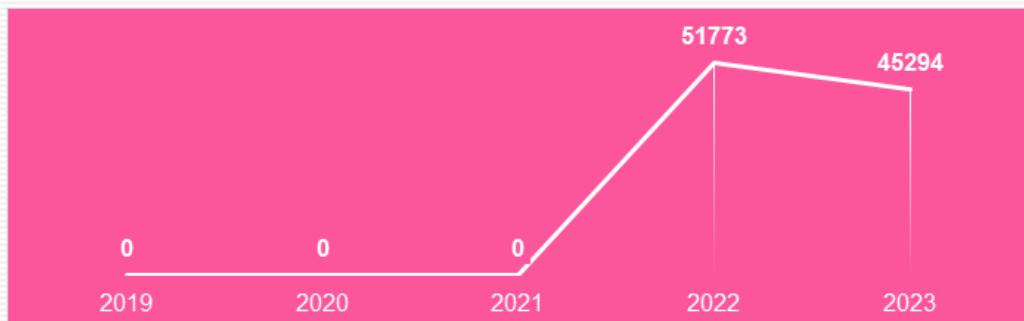
- infrastruktur Sumber Daya Air masih menjadi program prioritas dan merupakan salah satu program dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada Dinas PUTR. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan air irigasi di wilayah Kabupaten Majalengka

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

PROGRAM

EFISIENSI

- Efisiensi atas capaian indikator debit air termanfaatkan pada program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2023 adalah sebesar **0,20%**



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	45294 Ltr/Detik	45294 Ltr/Detik	100%

Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil pula mencapai target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat capaian kinerja “MENCAPAI TARGET” yaitu dari target 45294 Ltr/Detik berhasil direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 45294 ltr/detik. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja ini diantaranya adalah pada tahun 2023 sama halnya dengan infrastruktur jalan, program dan kegiatan penanganan infrastruktur Sumber Daya Air masih menjadi program prioritas yang merupakan salah satu program dengan alokasi anggaran yang cukup besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan air irigasi di wilayah Kabupaten Majalengka.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	100	110,45	-10,45

Indikator berikutnya adalah debit air termanfaatkan, capaian indikator pada tahun 2022 mencapai 110,45% dan mengalami penurunan sebesar -10,45% menjadi 100% namun demikian capaian tetap dapat dicapai sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Debit air termanfaatkan	45.294 Ltr/detik	45.294 Ltr/detik	100,00%

jika dibandingkan dengan target Renstra, untuk indikator debit air termanfaatkan pada tahun 2023 sudah terealisasi hingga mencapai 45.294 ltr/detik, maka pada capaian renstra dari target ini sudah mencapai 100% sesuai dengan target akhir renstra;

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata / standar Provinsi / Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	45294 Ltr/ Detik	n/a	Tidak dapat dibandingkan

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Indikator Kinerja Sasaran yang ke-4 yaitu **“Debit air termanfaatkan”**. Adapun Tingkat Capaian Kinerja untuk indikator ini berhasil pula mencapai target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat capaian kinerja “MENCAPAI TARGET” yaitu dari target 45294 Ltr/Detik berhasil direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 45294 ltr/detik. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja ini diantaranya adalah pada tahun 2023 sama halnya dengan infrastruktur jalan, program dan kegiatan penanganan infrastruktur Sumber Daya Air masih menjadi program prioritas yang merupakan salah satu program dengan



alokasi anggaran yang cukup besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan air irigasi di wilayah Kabupaten Majalengka.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja Debit air termanfaatkan dicapai melalui intervensi program yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Kepala Bidang Sumber Daya Air	49.236.879.110

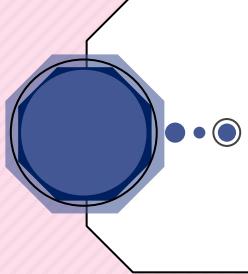
7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator **Debit air termanfaatkan** pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi yaitu 0,20% atau sebesar Rp96.182.135 dari pagu anggaran Rp49.236.879.110 dengan realisasi Rp49.140.696.975

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	100,95%	99,56%
2	Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah gedung yang memiliki SLF	160%	97,11%
3	Tertatanya Ruang	Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	82,95%
4	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit air termanfaatkan	100%	99,80%



BAB 4



KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun 2023 masih perlu ditingkatkan. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja Dinas PUTR adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat kemantapan jalan pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2023 hingga 100,95% dari target 85,29% berhasil direalisasikan hingga mencapai 86,10%;
- 2) Jumlah gedung yang memiliki SLF berhasil melampaui target dengan nilai capaian kinerja mencapai 160% yaitu dari target 50 Gedung berSLF dapat direalisasikan hingga 80 Gedung yang memiliki SLF;
- 3) Persentase lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang dapat terealisasi 100% sesuai target, yakni dari target 92% dapat terealisasi 92%;
- 4) Indikator debit air termanfaatkan berhasil mencapai target dengan nilai capaian kinerja mencapai 100% yaitu dari target 45294 Ltr/Detik berhasil direalisasikan 100% pada tahun 2023; dan
- 5) Nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah belum dapat dihitung pencapaian kinerjanya karena hasil penilaian RB Perangkat Daerah belum kami terima hingga dokumen ini dibuat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelaraskan kembali indikator-indikator kinerja dalam seluruh dokumen perencanaan;
- 2) Mengevaluasi capaian kinerja secara berkala;
- 3) Menyesuaikan target kinerja sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. KH. Abdul Halim No. 99 Majalengka 45418

Telp. (0233) 281020 Fax. (0233) 281555

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 15 TAHUN 2024

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- 11.Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

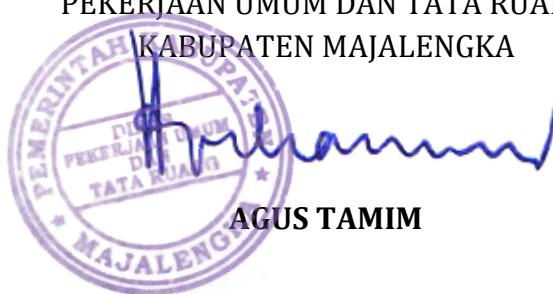
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN MAJALENGKA



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka

Nomor : 15 Tahun 2024

Tanggal : 4 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2023

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Perangkat Daerah
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
4	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga; 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air; 3. Kepala Bidang Tata Bangunan; 4. Kepala Bidang Tata Ruang; 5. Kepala Bidang Bina Konstruksi; 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 7. Kepala Sub Bagian Keuangan; 8. Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan; 9. Kepala UPT Laboratorium Pengujian Bahan; 10. Kepala UPT PKBTR Wilayah Majalengka; 11. Kepala UPT PKBTR Wilayah Jatituhuh; 12. Kepala UPT PKBTR Wilayah Jatiwangi; 13. Kepala UPT PKBTR Wilayah Leuwimunding; 14. Kepala UPT PKBTR Wilayah Maja; 15. Kepala UPT PKBTR Wilayah Talaga; 16. Kepala UPT PKBTR Wilayah Bantarujeg. 17. Kepala UPT Sumber Daya Air Bantarujeg; 18. Kepala UPT Sumber Daya Air Talaga; 19. Kepala UPT Sumber Daya Air Majalengka;

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Perangkat Daerah
		<p>20. Kepala UPT Sumber Daya Air Jatituhuh;</p> <p>21. Kepala UPT Sumber Daya Air Dawuan;</p> <p>22. Kepala UPT Sumber Daya Air Sukahaji;</p> <p>23. Kepala UPT Sumber Daya Air Rajagaluh;</p> <p>24. Kepala UPT Sumber Daya Air Jatiwangi; dan</p> <p>25. Kepala UPT Sumber Daya Air Sumberjaya.</p>



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka

Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 4 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2023

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

B. KETUA

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Melaporkan hasil pelaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka kepada penanggung jawab.

C. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua Tim menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua Tim menyusun Laporan Pelaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
3. Membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
4. Menyelenggarakan administrasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;

D. ANGGOTA

1. Menyiapkan dan menyediakan data-data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AGUS TAMIM, ST., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI M.M.Pd**
Jabatan : Bupati Majalengka
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

B U P A T I
MAJALENGKA
Dr. H. KARNA SOBAHI M.M.Pd.
Pihak Kedua,

Majalengka, November 2023
Pihak Pertama,
AGUS TAMIM, ST., M.Si.
NIP. 19661109 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	85,29%
2.	Meningkatnya Gedung Dan Lingkungannya Yang Laik Fungsi	Jumlah Gedung Yang Memiliki SLF	50 Gedung
3.	Tertatanya Ruang	Persentase Lahan Yang Sesuai Dengan Peruntukan Ruang	92%
4.	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	Debit Air Termanfaatkan	45.294 lt/detik

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 171.021.815.170,00	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 601.162.500,00	APBD
3.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp. 1.366.593.500,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 520.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 49.236.879.110,00	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 26.097.340.443,00	APBD
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp. 492.077.100,00	APBD
JUMLAH		Rp. 249.335.867.822,00	APBD



Majalengka, November 2023
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang,
 AGUS TAMIM, ST., M.Si.
 NIP. 19661109 199703 1 001

BUKTI SEBAR LKIP TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA

